

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004.
- Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Ashiddiqie, Jimly. *“Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*: Ghalia Indonesia, 1994.
- Azhary. *Ilmu Negara: Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Kranenburg*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Bakhri, Syaiful. *Migas Untuk Rakyat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- Bogason, P. *Public Policy and Local Governance*. Cheltenham: Edward Elgar, 2000.
- Deliarnov. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Hartono, Sunaryati. *Apakah The Rule of Law?*. Bandung: Alumni, 1968.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Rajawali Pers, 2012.
- H. Zainal Asikin dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- James, J. *Prinsip-Prinsip Sains Untuk Keperawatan*. Jakarta: Erlangga, 2008.

- Le Leuch, Honore. *Chapter 5 Contractual Flexibility in New Petroleum Investment Contract*. Beredjick Edition: Petroleum Investment Policies in Developing Countries, 1988.
- Lubiantara, Benny. *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Lubiantara, Benny. *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*. Jakarta: Grasindo, 2012.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Negara di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Nazir, Moh. "*Metode Penelitian*". Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Partowidagdo, Widjajono. *Mengenal Pembangunan dan Analisis Kebijakan. Program Pascasarjana Studi Pembangunan: Institut Teknologi Bandung*, 2004.
- Partowidagdo, Widjajono. *Migas dan Energi di Indonesia Permasalahan dan Analisis Kebijakan*. Bandung: Development Studies Foundation.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syahrani, H. Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Cetakan V. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1962.

Wahyono, Padmo. *Guru Pinandita*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.

Yamin, Muhammad. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4152)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4957)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5226)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5253)*.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226)*.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24)*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4216)*.

Indonesia. *Keputusan Menteri ESDM Nomor 3135 K/08/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.*

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003. Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanggal 21 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007. Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanggal 17 Desember 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanggal 13 November 2012.

D. Artikel/Jurnal

Arizona, Yance. *Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.*

Asshiddiqie, Jimly. *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004, dalam *Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

Djafar, Wahyudi. "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010.

Dwi Qurbani, Indah. *Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*. *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012.

Hayati, Tri., dkk. *Konsep Penguasaan negara di sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, 2005.

JLK, Valerine. *Metode Penelitian Hukum*. Kumpulan Materi Kuliah. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

L. Purba, Sampe. *Mencari Model Kelembagaan Sektor Hulu Migas Dalam Revisi Undang-Undang*. Makalah dalam diskusi publik di Hotel Grand Sahid Jaya, 4 Desember 2013.

Magnar, Kuntana., Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik. *Tafsir MK atas pasal 33 UUD 1945: (Studi atas Putusan MK Mengenal Judicial Review*

UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002). “Jurnal Konstitusi”, Volume 7, Nomor 1 Februari 2010.

MD, Mahfud. “Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum di Indonesia”. Jurnal Hukum No. 3 Vol 16 Tahun 2009.

Mukhtie Fadjar, Abdul. Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik, Pidato Pengukuhan Guru Besar, 13 Juli. Malang: FH Universitas Brawijaya, 2002.

Pidato dari Mohammad Hatta pada tahun 1949 dan tahun 1970 sebelum wafat menyatakan bahwa apabila Indonesia tidak mempunyai uang dapat meminjam asing, apabila tidak mempunyai pinjaman maka dapat menggunakan modal asing untuk sementara waktu.

Radjagukguk, Erman. Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum RUU Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Selasa 27 November 2012.

Robbins, Stephen. “Perilaku Organisasi”, Prentice Hall. Edisi kesepuluh: Sabardini, 2006. “Peningkatan Kinerja Melalui Perilaku Kerja Berdasarkan Kecerdasan Emosional”. Telaah Bisnis, Volume 7, Nomor 1, 2006.

Sri Rahyani, Wiwin. Desain Tata Kelola Kelembagaan Hulu Migas Menuju Perubahan UU Migas. Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2015.

Tjakrawerdaja, Subiakto. Menunggu UU Induk Mengenai Perekonomian Nasional, Reform Review (Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Krisis). Volume II Nomor 1 April-Juni 2008.

Thurber, Mark dan kawan-kawan. Pengaruh Pemisahan Tiga Fungsi Yang Mencakup Kebijakan, Regulasi dan Komersial Terhadap Kinerja Produksi di Beberapa Negara Eksportir Minyak. Universitas Stanford, 2011.

Z. Titahelu, Ronald. Penetapan Azas-azas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat. Surabaya: Disertasi Program Pasca Sarjana pada Universitas Airlangga, 1993.

E. Kamus

KBBI Daring. *akun.ta.bi.li.tas*.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabilitas>. Diakses tanggal 18 April 2020.

KBBI Daring. *ek.sploi.ta.si*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksploitasi>. Diakses tanggal 18 April 2020.

F. Internet

- Anonim. Industri Hulu Migas. <https://www.prosesindustri.com/2015/02/industri-hulu-migas.html>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.
- Anonim. Putusan MK Bubarkan BP Migas buat Situasi Daryrat. http://www.mediaindonesia.com/read/2012/11/11/363453/284/1/Putusan_MK_Bubarkan_BP_Migas_buat_Situasi_Darurat.
- Inilah Amar Putusan MK Terkait BP MIGAS Bertentangan dengan UUD. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=77651945>.
- Kementerian ESDM. *Peran Nasional Dalam Pengusahaan Migas Terus Berkembang*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/peran-nasional-dalam-pengusahaan-migas-terus-berkembang>. Diakses tanggal 18 April 2020.
- Kementerian ESDM. *Peran Nasional dalam Pengusahaan Migas Terus Berkembang*. <http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/2369-peran-nasional-dalam-pengusahaan-migas-terus-berkembang.html>. Diakses tanggal 2 Maret 2019.
- Notonegoro, Komaidi. Menunggu Nasib Undang-Undang Tata Kelola Migas. <http://migasreview.co./menunggu-nasib-undang-undang-tata-kelola-migas.html>.
- Perpres 95/2012 Agar Industri Migas Tidak Vakum. <http://www.komhukum.com/komhukum-detail-edukasi-744-perpres-952012-agar-industri-migas-tidak-vakum.html#.UKcQe2c.LMo>.
- Prasodjo, Darmawan. Memahami Skema Tiga Kaki Dalam Pengelolaan Migas. <http://migasreview.com/memahamiskema-tiga-kaki-dalam-pengelolaanmigas.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Ratnaningsih, Erna. Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. <https://business-law-binus.ac.id/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamahkonstitusi>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.
- Shantika. Putusan MK atas Uji Materi Undang-Undang Migas. <http://shantidk.wordpress.com/2012/12/12/putusan-mk-atas-uji-materi-uu-migas/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.